

Mata Kuliah : Manajemen Pelabuhan Perikanan dan Kesyahbandaran
 Kode/Bobot/Semester : TPI 2.38.4.2 /2 sks (1 - 1)/IV
 Capaian Pembelajaran : Mampu memiliki pengetahuan tentang manajemen operasi pelabuhan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan serta mampu menerapkannya untuk pengembangan/pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kapal perikanan

No	Kompetensi	Sub Kompetensi / Pokok Bahasan	Tatap Muka Ke
1	Menjelaskan karakteristik pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran perikanan	1.1. Pengertian pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran 1.2. Pengertian syahbandar dan kepelabuhanan 1.3. Karakteristik pelabuhan perikanan 1.4. Tata hubungan kerja di pelabuhan perikanan	1
2	Menjelaskan dan mengidentifikasi klasifikasinya Pelabuhan perikanan	2.1 Pelabuhan Perikanan Samudera 2.2 Pelabuhan Perikanan Nusantara 2.3 Pelabuhan Perikanan Pantai 2.4 Pangkalan Pendaratan Ikan	2
3	Menjelaskan fungsi dan peranan pelabuhan perikanan serta tugas dan fungsi petugas kesyahbandaran	3.1 Fungsi pelabuhan perikanan 3.2 Peranan pelabuhan perikanan 3.3 Identitas syahbandar 3.4 Tugas dan fungsi petugas kesyahbandaran	3
4	Menjelaskan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang di pelabuhan perikanan serta sarana dan prasarana fungsional syahbandar	4.1 Fasilitas pokok pelabuhan 4.2 Fasilitas fungsional Pelabuhan	4
		4.3 Fasilitas Penunjang Pelabuhan 4.4 Sarana dan prasarana fungsional syahbandar	5
5	Menjelaskan panduan operasional di pelabuhan perikanan dan penerapannya	5.1 Rekomendasi pembangunan pelabuhan perikanan 5.2 Pembangunan pelabuhan perikanan 5.3 Pengoperasian Pelabuhan Perikanan	6
6	Memahami tatacara mengatur	6.1 memahami tatacara keberangkatan kapal perikanan	7

	keberangkatan kapal perikanan	6.2 Cara menerbitkan Surat Tanda Bukti Keberangkatan Kapal Perikanan 6.3 Pemeriksaan dokumen keberangkatan kapal	
Ujian Tengah Semester			8
7	Memahami tatacara mengatur kedatangan kapal perikanan	7.1 pemberitahuan rencana kedatangan dari nakhoda 7.2 dokumen kapal perikanan kepada syahbandar 7.3 Tata cara menerbitkan Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan	9
8	Memahami tata cara menerbitkan surat persetujuan berlayar	8.1 Syarat dan tata cara penerbitan 8.2 Penundaan keberangkatan kapal perikanan 8.3 Pembebasan dan pencabutan surat persetujuan berlayar kapal perikanan	10
9	Memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan	9.1 Persyaratan dan tata cara pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan 9.2 Memeriksa alat penangkapan ikan 9.3 Alat bantu penangkapan ikan	11
10	Memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut	10.1 Persyaratan perjanjian kerja laut 10.2 Tatacara memeriksa dan mengesahkan PKL 10.3 Memeriksa Pemenuhan Persyaratan Pengawakan Kapal Perikanan	12
11	Memeriksa log book penangkapan ikan dan SIHT	11.1 Tata cara memeriksa log book penangkapan ikan 11.2 Memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan	13
12	Mengatur olah gerak dan Lalu Lintas Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan	12.1 Lalu lintas dan antrian kapal perikanan 12.2 Mengawasi pemanduan 12.3 Mengawasi pengisian bahan bakar	14
13	Memahami tatacara pembinaan, pelaporan	13.1 Tatacara pembinaan kesyahbandaran	15

	dan evaluasi kesyahbandaran	13.2 Tatacara pelaporan kesyahbandaran 13.3 Tatacara evaluasi kesyahbandaran	
Ujian Akhir Semester			16

Daftar Pustaka:

1. Bambang Murdiyanto, 2004. Pelabuhan Perikanan. Bogor : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor
2. Darwanto, SB., A.S. Murnijati. 2003. Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) . Jakarta : Departemen Kelautan dan Perikanan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Jakarta.
3. Lubis E. 2012. Pelabuhan Perikanan. IPB Press. Bogor
4. Anonymous 2001. Dokumen Pedoman Pelatihan dan Sertifikasi Awak Kapal Penangkap Ikan. Jakarta : Pusat Pengembangan SDM KP. Departemen Kelautan dan Perikanan.
5. Anonymous 2006. Materi Pelatihan Kelayakan Kapal Perikanan di BP3 Aertembaga. Jakarta : Dirjen Tangkap DKP
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PERMEN-KP/2013 Tentang Kesyahbandaran Di Pelabuhan Perikanan
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 71 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan.
8. Peraturan pemerintah RI nomor 31 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayaran.
9. Peraturan pemerintah RI nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan.
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8/MEN/2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan.
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
13. Undang-Undang Nomor 45 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

